

Bro 968
16

**REVOLUSI,
ANGKATAN BERSENDJATA
&
PARTAI KOMUNIS**

D. N. AIDIT

**REVOLUSI,
ANGKATAN BERSENDJATA &
PARTAI KOMUNIS
(PKI dan AURI)**

II

D.N. Aidit

Menko/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI



**Jajasan „Pembaruan”
Djakarta 1964**

Az 210

Sekedar Pengantar

Untuk kedua kalinya, pada tanggal 17 Maret 1964, Menko/Wakil Ketua MPRS dan Ketua CC PKI D.N. Aidit telah memberikan tjeramah dihadapan para perwira AURI — kali ini dihadapan para mahasiswa Sekolah Staf Komando AURI (SESKOAU), Djakarta.

Tjeramah jang diberi judul *Pembangunan PKI dan Revolusi Indonesia*, dengan seizin pentjeramahnja dibukukan dengan nama *Revolusi, Angkatan Bersendjata & Partai Komunis*.

Semoga penerbitan ini bisa sekedar memberikan sumbangan untuk lebih memperkuat tradisi persatuan jang sudah lama ada antara PKI dan Angkatan Bersendjata umumnja dan AURI chususnja guna menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 45 dan untuk melaksanakan Triprogram Pemerintah jaitu: a. sandangpangan; b. penggantian „Malaysia“, dan c. meneruskan pembangunan.

Penerbit

Djakarta, Djuni 1964

Saja menjambut baik dan menjatakan terima-kasih atas undangan jang diberikan kepada saja, baik sebagai Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia maupun sebagai Wakil Ketua MPRS untuk memberikan tjeramah dihadapan para perwira Sekolah Staf Komando AURI (SES-KOAU). Tjeramah saja hari ini bukan tjeramah untuk pertama kalinya dihadapan para perwira Angkatan Udara Republik Indonesia.

Pada tanggal 5 April tahun 1963 saja telah memberi tjeramah kepada para perwira AURI, jang ketika itu saja beri judul: *Manipol-Usdek bukan hanya tidak bertentangan, bahkan sesuai dengan Marxisme.*

Tidak ber-lebih*an kalau saja katakan bahwa saling mengerti dan persatuan makin hari makin bertambah erat antara setiap Angkatan Bersen-djata Republik Indonesia, termasuk AURI, dengan berbagai golongan Rakjat Indonesia, termasuk kaum Komunis. Tradisi persatuan sudah dimulai sedjak berkobarnya Revolusi Agustus 1945 dan kemudian semua orang revolusioner berusaha keras untuk mengembangkannya.

Sekarang sudah tidak dirasakan djanggal lagi bahwa pemimpin Komunis berbitjara menguraikan pendirian*nya dihadapan perwira* Angkatan Ber-sendjata RI. Sebaliknya jang djanggal ialah anggapan jang mengira bahwa jang wadjar ini sebagai suatu kedjanggalan. Memang, jang lapuk selama-

nja menentang jang baru, tetapi tentangan itu tidak menghentikan perkembangan jang baru. Sebaliknya mempertjepat proses pembusukan dari jang lama dan reaksioner itu sendiri.

Tjeramah kali ini saja beri djudul: *Pembangunan PKI dan Revolusi Indonesia*. Sesuai dengan permintaan dalam surat Saudara², tjeramah ini akan mentjakup berbagai masalah seperti masalah sedjarah PKI, hubungan PKI dengan program bersama Manipol dan tugas² urgen PKI. Sudah tentu, mengingat sempitnja waktu, saja akan membatasi diri pada beberapa soal jang pokok dan penting sadja.

Seperti jang sudah saja tegaskan baik dalam tjeramah saja di SESKOAD (29 Djuni 1963) maupun di SESKOAL (16 Djuli 1963), satu²nja tjara jang tepat didalam membahas segala soal politik dan sosial haruslah dalam hubungan dengan Revolusi Indonesia. Djuga dalam usaha memahami PKI tidaklah bisa tepat apabila tidak dihubungkan dengan Revolusi Indonesia. PKI dan Revolusi Indonesia adalah dwitunggal jang tak dapat dipisah²kan. Semakin kita memahami PKI, semakin djelas dan menjeluruh pengertian kita tentang Revolusi Indonesia. Demikian pula, semakin kita memahami Revolusi Indonesia, semakin terang dan mendalam pengertian kita tentang PKI. Lagi pula, hanya dengan demikian orang bisa terhindar dari segala matjam penjakit phobi²an, termasuk Komu-

nisto-phobi, dan bisa dengan teguh mendjadi peserta aktif dalam Revolusi Indonesia.

Tjeramah ini saja bagi dalam dua bagian :

Jang pertama: *Tentang Soal² Pembangunan PKI*, dan jang kedua, *Tentang Soal² Revolusi Indonesia*.

I. TENTANG SOAL² PEMBANGUNAN PKI

Sebagaimana halnja dengan partai² revolusioner lainnja, PKI adalah sudah merupakan alat revolusi sebelum Revolusi Agustus 1945 petjah, sebelum kita mempunjai alat² revolusi lainnja seperti jang kita kenal sekarang ini. Walaupun para hadirin bukan anggota PKI, tetapi saja dengan segala senang hati memenuhi permintaan Sdr² menguraikan tentang pembangunan PKI. Tiap warganegara Indonesia berhak mengetahui segalasesuatu tentang PKI, karena PKI adalah djuga milik nasion, dan bukan hanya milik kaum Komunis Indonesia.

PKI adalah Partai klas buruh Indonesia, Partai kaum Marxis Indonesia, jang didirikan pada tgl. 23 Mei 1920, sebagai perkembangan lebih landjut dari ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging atau PSDH — Perhimpunan Sosial Demokratis Hindia), jaitu organisasi kaum Marxis jang pertama di Indonesia jang berdiri dalam tahun 1914. Lahirnja PKI bukanlah gejala kebetulan,

tetapi gejala objektif. PKI lahir dalam zaman imperialisme yang melahirkan kelas buruh di Indonesia, PKI lahir sesudah ada serikatburuh² di Indonesia, lebih² sesudah ada ISDV, dan sesudah dunia terbelah menjadi dua kubu, kubu sosialis dan kubu kapitalis dengan menangnya Revolusi Sosialis di Rusia tahun 1917. Ia merupakan produk yang wajar dari perkembangan perjuangan kelas ditanahair kita, dari perkembangan sedjarah masyarakat kita. Oleh karenanya kaum Komunis Indonesia sering mengatakan bahwa *PKI adalah anak zaman yang lahir pada waktunya*.

Di-waktu² yang lalu ada orang² yang suka menfitnah bahwa PKI adalah „barang import” atau „tidak asli”. Pandangan sedemikian bukan hanya tidak benar menurut kenyataan sedjarah, tapi juga samasekali tidak ilmiah. Kalau setjara objektif dan ilmiah klas burdjuis ketjil dan burdjuis nasional Indonesia memerlukan adanya partai² politik guna memperjuangkan kepentingan² politiknya, maka adalah juga objektif dan ilmiah jika klas buruh Indonesia memerlukan PKI untuk memelopori perjuangan bagi kepentingan² politiknya. Dapatlah kita bayangkan betapa terbelakangnya gerakan buruh dan gerakan Rakjat pekerdja Indonesia seandainya tidak ada PKI yang memelopori gerakan ini.

PKI termasuk partai politik yang tertua diantara 10 partai politik yang ada dan sah sekarang ini.

Sudah sedjak lahirnya PKI selalu merupakan bagian yang takterpisahkan dari gerakan kemerdekaan nasional, dan selalu mengintegrasikan diri dengan gerakan Rakjat Indonesia. Apakah yang demikian itu „barang import”? Tidak, PKI adalah anak kandung daripada tingkat tertentu perkembangan sedjarah Indonesia. Ini adalah kenyataan, betapapun disangkal, ia tetap kenyataan. Ketika kaum Komunisto-phobi yang kita kenal sekarang ini masih ingusan dan mungkin diantaranya ada yang sedang asjik menjembah pemerintah kolonial, atau mungkin belum lagi lahir, PKI sudah berjuang mati²an melawan kolonialisme untuk Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Adjaran Marxisme-Leninisme yang menjadi pedoman PKI adalah universal. Sebagaimana semua adjaran universal ia bisa mendapat tempat dimanapun didunia ini. Tetapi sebagaimana pula halnya dengan adjaran universal lainnya, ia hanya bisa berakar disesuatu negeri jika ia mengintegrasikan diri dengan penduduk negeri itu. Dalam hal ini, mengenai PKI seudjung rambutpun tidak bisa diragukan. Bukan hanya dengan klas buruh, tetapi juga dengan massa kaum tani dan Rakjat pekerdja lainnya, dan bahkan dengan seluruh nasional, PKI sudah dan sedang mengintegrasikan dirinya. Dalam rangka pengintegrasian ini, PKI sudah dan sedang dengan berhasil meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme, mewujudkan kebe-

naran uni-versil Marxisme-Leninisme mendjadi kebenaran kongkrit dan kenjataan kongkrit di Indonesia.

Perkembangan PKI hingga kini, pada pokoknja dapat dibagi dalam 4 periode sbb. :

Periode I : periode pembentukan Partai dan perdjuaan melawan teror putih pertama (1920 — 1926).

Periode II : periode perdjuaan dibawah tanah dan front anti-fasis (1926 — 1945).

Periode III : periode Revolusi Agustus 1945 dan perdjuaan melawan teror putih kedua (1945 — 1951).

Periode IV : periode front nasional dan pembangunan Partai (1951 — sampai sekarang).

Saja tidak bermaksud untuk menguraikan perkembangan PKI periode demi periode, tapi hanja akan menjebut beberapa soal jang penting. Selama Partai dalam masa kanak², Partai belum dapat memahami keadaan masyarakat Indonesia dan soal² dari Revolusi Indonesia, dan djuga belum dapat menarik pelajaran dari pengalaman²nja sendiri. Makaitu ketika Revolusi Agustus 1945 petjah, PKI masih belum berhasil mendorong revolusi mentjapai kemenangan penuh. Tetapi sesudah PKI mengindjak mendjadi dewasa sedjak pembangunannja kembali dalam tahun 1951, dan terutama sekali sedjak Kongres Nasional Ke-V

PKI dalam bulan Maret tahun 1954, maka PKI berkat pandangannja jang tepat sudah mulai mengenali sifat masyarakat Indonesia dan dapat memetjahkan setjara tepat soal² pokok Revolusi Indonesia serta mulai menjimpulkan pengalamannja tentang front nasional, perdjuaan revolusioner bersendjata dan pembangunan Partai. Tahun 1951 telah mendjadi titikbalik bagi kehidupan PKI. Sedjak itu PKI telah dibangun kembali berdasarkan Konstitusi baru dan berdasarkan gerakan perluasan organisasi dan anggota, jang disertai dengan pendidikan tentang Marxisme-Leninisme dan tentang soal² pokok Revolusi Indonesia.

Ketjuali sebagai periode pembangunan Partai, periode sekarang ini bagi PKI adalah djuga periode pembangunan front nasional.

1) MENGENAI FRONT NASIONAL

Sedjarah gerakan kemerdekaan nasional Indonesia sendiri telah menunjukkan tentang mutlak perlunja persatuan nasional atau front nasional. PKI yakin, bahwa salahsatu faktor jang menentukan akan kemenangan perdjuaan pembebasan nasional Indonesia ialah adanja persatuan nasional revolusioner. Makaitu PKI dengan gairah menjambut tulisan Bung Karno dalam tahun 1926 dengan judul „*Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*” jang dimuat sebagai tulisan pertama dalam buku „*Dibawah Bendera Revolusi*” dimana ditekankan tentang perlunja persatuan antara kaum Nasional-

is, kaum Agama, chususnja Islam, dan kaum Marxis. Tahun 1926 tidak hanya telah dikenal sebagai tahun Pemberontakan Nasional bulan November 1926, tapi djuga sebagai tahun dirumuskan ide *gotong-rojongan* dari 3 aliran besar di Indonesia, jaitu aliran politik *Nasionalis, Islam dan Marxis*, embrio gagasan *Nasakom*. Kalau mau tahu akar sedjarah Pantja Sila, inilah permulaannya!

Ide gotongrojong jang menjatupadukan 3 aliran politik jang besar itu terus mendjiwai gerakan kemerdekaan nasional. Hal ini tidak hanya terbukti dalam perdjjuangan anti-fasis jang dipelopori oleh Gerindo (Gerakan Rakjat Indonesia) mendjelang perang dunia kedua, tapi djuga selama pendudukan Djepang. Djuga dalam masa perang dunia kedua dan masa bekerdja dibawah tanah, perdjjuangan bangsa kita tetap berdasarkan persatuan nasional jang berporoskan Nasakom.

Hal ini nampak dengan djelas pada waktu Bung Karno mengusulkan ide Pantja Sila sebagai *alat pemersatu* bangsa dan dasar daripada Republik Indonesia. Tentang inti Gotongrojong ini dikatakan oleh Bung Karno sbb. : „Djikalau saja peras lima mendjadi tiga dan jang tiga mendjadi satu, maka dapatlah satu perkataan Indonesia jang tulen, jaitu perkataan Gotongrojong! Alangkah hebatnja Negara gotongrojong!“ (*Tubapi*, hal. 29).

Gotongrojong jang mendjadi perasan dari Pantja Sila adalah terang Gotongrojong berporoskan Nasakom, karena Pantja Sila itu sendiri adalah alat jang mempersatukan 3 aliran besar, jaitu aliran Nasionalis, Islam dan Marxis sebagaimana jang dinjatakan Bung Karno dalam tahun 1926, atau 3 aliran besar seperti jang kita kenal sekarang, jaitu Nasionalis, Agama dan Komunis. Djika golongan Nasionalis dalam Pantja Sila terutama diwakili oleh Sila Kebangsaan, golongan Agama terutama diwakili oleh Sila Ketuhanan Jang Maha Esa, maka golongan Komunis terutama diwakili oleh Sila Keadilan Sosial atau Sosialisme.

Tetapi, seperti sering dikemukakan oleh Presiden Sukarno „Pantja Sila adalah alat pemersatu! Pantja Sila bukan alat pemetjah-belah! Dengan Pantja Sila kita djuga mempersatukan tiga aliran besar jang bernama Nasakom itu. Djadi djangan mempergunakan Pantja Sila untuk mengadudomba antara kita dengan kita. Djangan mempergunakan Pantja Sila untuk memetjah-belah Nasakom, mempertentangkan kaum Nasionalis dengan kaum Agama, kaum Agama dengan kaum Komunis, kaum Nasionalis dengan kaum Komunis“. (*Resopim*).

Kaum Komunis Indonesia menjatakan dengan tegas „siapa setudju Pantja Sila harus setudju Nasakom, dan sebaliknya siapa setudju Nasakom harus setudju Pantja Sila“. (Laporan Politik kepada Sidang Pleno II CC PKI).

Makaitu kalau ada tindakan* jang berusaha memrétéli Pantja Sila se-enaknja sendiri, menurut selera sendiri*, seperti perbuatan „orang jang kepalanja sinting“, untuk memindjam kata* Bung Karno, maka tindakan demikian adalah kontra-revolusioner dan harus ditentang dan ditindak !

Pengalaman menundjukkan, bahwa djika kita setia pada UUD 1945, termasuk djuga setia pada Pantja Sila, maka adjaran gotongrojong jang berporoskan Nasakom bisa dipertahankan, diperdjuangkan dan dilaksanakan. Tapi djika kita meninggalkan UUD 1945, dan mengchianati Pantja Sila termasuk mengchianati kegotongrojongan nasional jang berporoskan Nasakom, maka persatuan nasional bisa petjah dan dajadjuang Rakjat anti-imperialis dan anti-feodal untuk menjelesaikan tuntutan* Revolusi Indonesia mendjadi dapat dipatahkan. Dalam sedjarah gerakan revolusioner hal ini dibuktikan oleh Peristiwa Madiun tahun 1948, jang ditjiptakan oleh kaum imperialis dan partai* pembantunja, ketika itu Masjumi dan PSI, jang didalangi oleh Hatta, Natsir, Sjahrir dan antek*nya jang telah lama meninggalkan UUD 1945, meninggalkan kegotongrojongan nasional, dan berusaha dengan melakukan pukulan* terhadap kaum Komunis dan gerakan revolusioner umumnja, untuk memudahkan kompromi. Sedangkan kaum nasionalis dan kaum agama jang djudjur tidak diuntungkan oleh Peristiwa Madiun

tersebut. Perlu saja tegaskan, bahwa djika seandainja ketika itu UUD 1945 berlaku sebagaimana mestinja, terutama sekali djika kekuasaan penuh ada dalam tangan Presiden Sukarno, Peristiwa Madiun tidak akan terdjadi.

Sedjak kita kembali ke UUD 1945 dalam tahun 1959 dan sedjak *Manipol* mendjadi Garis Besar Haluan Negara RI, maka terdapat dasar jang lebih kokoh bagi perkembangan persatuan nasional. PKI akan terus bergiat memperluas front persatuan nasional baik lewat Front Nasional, lewat kegiatan-kegiatan persatuan nasional berporoskan Nasakom, maupun lewat pengokohan persekutuan buruh dan tani, jaitu basis dari front persatuan nasional atau sebagaimana dikatakan Presiden Sukarno: sokoguru Revolusi Indonesia.

Kaum Komunisto-phobi sering sok-tahu dan memfitnah: bahwa kaum Komunis jang berfilsafat materialis tidak mungkin menerima Pantja Sila, karena sebagai materialis, kata mereka, tidak mungkin menerima sila Ketuhanan Jang Maha Esa.

Pertama: kaum Komunisto-phobi itu berusaha memrétéli Pantja Sila dengan hanja mengambil satu sila sadja, jaitu sila Ketuhanan Jang Maha Esa. Padahal kalau dibiarkan setiap golongan memrétéli Pantja Sila, ia bukan lagi alat pemersatu. Kaum Komunis menentang pemrétélan atau pemisahan sila* Pantja Sila. Pantja Sila harus diterima sebagai *kesatuan*, dan hanja djika demikian

la tidak bisa lain daripada alat pemersatu. Mengingat sila Ketuhanan J.M.E. dalam Pantja Sila, kaum Komunis Indonesia setjara sukarela menerima ketentuan bahwa berdasarkan Pantja Sila tidak boleh dilakukan propaganda anti-agama di Indonesia. Difihak lain, berdasarkan 4 sila lainnya sudah selajaknja pula fihak kaum agama menerima ketentuan bahwa berdasarkan Pantja Sila di Indonesia tidak boleh dilakukan paksaan beragama.

Kedua: Kaum Komunis, yang berfilsafat materialis, berpandangan dunia yang bertitktolak dari kenyataan objektif, tidak dari fikiran atau ide subjektif. Tidak bisa dimungkiri bahwa lima sila dari Pantja Sila itu mentjerminkan kenyataan objektif, mentjakup kepentingan² semua golongan Rakjat Indonesia, seperti sila Ketuhanan Jang Maha Esa atau monotheisme, sila Perikemanusiaan atau Internasionalisme, sila Kebangsaan atau Nasionalisme/Patriotisme, sila Kerakjatan atau Demokrasi dan sila Keadilan Sosial atau Sosialisme. Dalam proses sedjarah gerakan nasional di Indonesia sila² ini mentjerminkan kenyataan objektif dan jang setjara keseluruhannja sebagai kesatuan harus diterima dan dijadikan *alat pemersatu* dalam perjuangan revolusioner. Makaitu kaum Komunis yang berfilsafat materialis, yang bertitktolak dari kenyataan objektif, bisa menerima dan memperdjauangkannja dengan gigih sebagai alat pemersatu kekuatan² nasional jang revolusioner.

2) MENGENAI PEMBANGUNAN PKI

Berbitjara tentang pembangunan PKI tidak bisa terlepas dari kemadjuan² front persatuan nasional. Pembangunan Partai dan front persatuan nasional erat berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi kemadjuannja, lebih² setelah PKI mempunyai Konstitusi jang tepat sedjak tahun 1951 dan program jang tepat jang disahkan oleh Kongres Nasional V PKI tahun 1954 dan terus-menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan.

PKI telah berkembang dalam perdjuaan melaksanakan programnja jang konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal jang senantiasa disertai dengan gerakan², baik gerakan tentang perluasan anggota maupun gerakan pendidikan Marxisme-Leninisme dalam Partai. Salahsatu pengalaman penting dalam pembangunan PKI ialah pengalaman *bekerdja dengan Plan*, jang sedjak tahun 1951 telah mendjadi kebiasaan dalam tjarakerdja Partai. Pengalaman kami menunjukkan bahwa *bekerdja dengan Plan* bukan hanya mungkin, tapi djuga harus, bekerdja dengan Plan mendjauhkan kita dari tjarakerdja spontan dan mendjamin kesiapsediaan Partai melaksanakan tugas²nja. Plan mendjamin bahwa kita selalu melakukan pekerdjaan se-hari² dan membikin aktivitas Partai tidak mungkin terhenti oleh sebab² apapun. Pada waktu di-daerah² meletus pemberontakan kontra-revolusioner „PR-

RI-Permesta" dalam tahun 1958, banjak orang Komunis yang ditangkap dan dibunuh, seperti di Sumatera Barat, tapi organisasi PKI tidak patah, ia melakukan perlawanan yang gigih terhadap kaum pemberontak bersama dengan alat^a negara dan meneruskan pembangunan Partai dengan ber-Plan.

PKI telah menyelesaikan dua kali Plan yang berdjangka pandjang, jaitu *Plan Tiga Tahun Pertama mengenai Organisasi dan Pendidikan* (1956 — 1959) dan *Plan Tiga Tahun Kedua mengenai Pendidikan dan Organisasi* (1960 — 1963). Pendidikan Partai telah dilakukan dari tingkat Central sampai keorganisasi-organisasi basis, sedangkan pendidikan itu digabungkan dengan tugas^a Partai pada masa^a tertentu serta dengan tugas^a penelitian (research). PKI menekankan bahwa pembangunan organisasi adalah penting, tapi pembangunan ideologi adalah lebih penting lagi. Disemua tingkat Sekolah Partai diberi pendidikan tentang prinsip^a fundamental Marxisme-Leninisme terutama lewat matapelajaran *Materialisme Dialektik dan Histori* (MDH) dan *Ekonomi Politik Marxis* (EPM) yang bertudjuan untuk membentuk dan memperkuat pendirian, pandangan dan metode klas buruh, memperkuat ideologi klas buruh. Disamping MDH dan EPM, pada semua tingkat sekolah Partai diberi peladjaran tentang *Gerakan Buruh Internasional* (GBI) yang bertudjuan untuk mem-

pertebal pendidikan patriotisme revolusioner dan internasionalisme sosialis. Mata peladjaran yang paling pokok ialah tentang Soal^a *Revolusi Indonesia* (SRI) yang sesuai dengan Manipol. Semua matapeladjaran adalah untuk membantu memahami setjara tepat Soal^a Revolusi Indonesia, agar dapat dengan lebih baik lagi mengabdikan pada Revolusi Indonesia. Hasil terbesar dari pembangunan Partai hingga kini ialah *kebulatan fikiran Marxisme-Leninisme* dikalangan kaum Komunis Indonesia. Kebulatan fikiran ini tidak hanya mengenai soal^a Revolusi Indonesia, tetapi djuga mengenai semua politik dan kebidjaksanaan yang didjalankan oleh CC, mengenai soal^a politik dalam negeri dan soal^a politik luar negeri, termasuk soal^a Gerakan Komunis Internasional.

PKI telah menjadi Partai Marxis-Leninis yang beranggotakan lebih dari duasetengah djuta, dan merupakan Partai Komunis yang terbesar diluar kubu sosialis, Partai Komunis nomor tiga besarnya diseluruh dunia, salahsatu partai besar didalam negeri, sudah tersebar diseluruh negeri serta terkonsolidasi dibidang politik, organisasi dan ideologi. Pada umumnya para anggota PKI kini telah terdidik dalam pandangan, pendirian, metode dan semangat Marxis-Leninis. Dengan pimpinan kaum Komunis Indonesia telah diorganisasi lebih dari 3½ djuta kaum buruh dalam serikatburuh^a revolusioner dan lebih dari 7 djuta kaum tani didalam

organisasi massa tani revolusioner (BTI).

Dengan demikian pada pokoknya PKI telah berhasil meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme yang pada hakekatnya mengintegrasikan PKI yang Marxis-Leninis dengan kaum tani. Sedjak 17 Agustus 1963 PKI sedang melaksanakan *Plan Empat Tahun mengenai Kebudayaan, Ideologi dan Organisasi*, yang mentjakup tugas yang mendesak di-bidang tsb. bagi pembangunan Partai dan tentu akan memberi pengaruh yang besar bagi kemajuan gerakan revolusioner di Indonesia.

Demikianlah dengan singkat tentang soal pembangunan PKI, yang sesuai dengan permintaan Sdr., dengan segala senang hati telah saja uraikan. Djika ingin tahu lebih banyak tentang pembangunan PKI, para Sdr. saja persilahkan mempelajari dokumen PKI. Djika dibanding dengan partai politik lain, PKI adalah Partai yang paling banyak mengeluarkan dokumen yang menerangkan kehidupan internnya. Ini tidak bisa lain, karena PKI disamping Partai kader, adalah Partai massa, oleh karena itu segalasesuatu harus tjepat diketahui oleh massa anggota yang luas dengan djalan mengumumkannya.

II. TENTANG SOAL* REVOLUSI INDONESIA

Revolusi Agustus 1945, meskipun merupakan revolusi yang tuntutan²nja belum selesai, telah mem-

beri pelajaran² penting kepada Rakyat Indonesia. Ia telah menunjukkan bahwa adalah sangat penting bagi kita untuk mengenal baik sifat masyarakat Indonesia agar mengenal baik pula soal pokok revolusi Indonesia, jaitu sasaran² revolusi, tugas² revolusi, kekuatan² revolusi dan kekuatan² pendorong revolusi, sifat revolusi dan perspektif atau haridepan revolusi Indonesia. Begitu banyak pelajaran yang diberikannya. Sungguh benarlah utjapan Lenin, bahwa „setiap bulan dari masa sedemikian adalah sama dengan seluruh tahun perkembangan 'damai', 'konstitusionil'."

Revolusi Agustus '45 djuga memberi petunjuk tentang mutlak perlunya front persatuan nasional yang berdasarkan persekutuan buruh dan tani dan yang dipelopori oleh klas buruh, tentang mutlak perlunya Partai Marxis-Leninis, jaitu PKI, yang erat berhubungan dengan massa, tersebar diseluruh negeri dan terkonsolidasi dilapangan organisasi, politik dan ideologi, dan bahwa dalam revolusi perdjuaan bersendjata Rakyat adalah bentuk perdjuaan yang terpenting dalam mengalahkan imperialisme dan kaum kontra-revolusioner.

Salahsatu pelajaran yang terpenting dari revolusi Agustus ialah bahwa djika revolusi nasional dan demokratis di Indonesia hendak mentjapai kemenangan, maka PKI harus mampu memadukan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia, PKI harus

meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme. Proses meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme sudah berdjalan sedjak PKI berdiri (1920), dan bahkan sedjak ISDV (1914), tetapi pemahkotaannja baru dalam tahun 1954 (Kongres Nasional ke-V PKI) dan proses ini masih berdjalan terus.

Dengan meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme, klas buruh dan Rakjat pekerdja Indonesia mendapat sendjata ampuh ditangan dalam perdjuangannja untuk Indonesia jang merdeka penuh dan demokratis melawan imperialisme dan sisa² feodalisme sebagai landasan untuk menudju ke Sosialisme.

Dalam bukunja „*The National-Liberation Movement in the East*“, W.I. Lenin djuga pernah menekankan dihadapan para Komunis negeri² Timur, bahwa mereka dengan bersandarkan teori dan praktek umum Komunisme „harus menjesuaikan diri pada sjarat² khusus jang tidak ada di-negeri² Eropa dan harus tjakap mentrapkan teori dan praktek itu pada sjarat² dimana djumlah jang sangat terbanjak dari penduduk adalah kaum tani“. Kaum Komunis di-negeri² Timur, demikian Lenin selandjutnja, harus „menterdjemahkan adjaran Komunis jang sedjati kedalam bahasa tiap² Rakjat“. Ini tidak mempunjai arti lain, ketjuali bahwa kaum Komunis Indonesia harus meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme.

1) TENTANG SIFAT MASJARAKAT INDONESIA DAN SOAL² POKOK REVOLUSI INDONESIA

Memahami sifat masjarakat Indonesia berarti memahami kenjataan² objektif mengenai susunan ekonomi, politik dan kebudayaan negeri kita. Meskipun Republik Indonesia sudah berumur hampir 19 tahun, ada Kabinet Kerdja susunan baru, ada MPRS dan DPRGR jang berporoskan serta dengan pimpinan Nasakom, ada Angkatan Bersendjata jang anti-imperialis, kita senantiasa bisa mempersoalkan apakah dalam politik RI sudah sepenuhnya berdaulat, apakah dalam ekonomi RI sudah sepenuhnya berdiri diatas kaki sendiri, apakah dalam kebudayaan RI sudah sepenuhnya berkepribadian nasional.

Tidak bisa dibantah bahwa kenjataan² dibidang ekonomi di Indonesia menundjukkan bahwa kaum imperialis terutama imperialis Amerika Serikat, masih bertjokol ditanahair kita, masih menguasai kehidupan ekonomi kita, terutama dibidang perminjakan. Dengan menjengkramnja kapital monopoli AS dalam bentuk lama, terutama dibidang perminjakan, maupun dalam bentuk baru seperti pensalahgunaan prinsip² „production sharing“, terselenggaranja „joint venture“ dsb., mereka menguras kekajaan alam kita, memeras tenaga kerdja Rakjat kita dan mempertahankan Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar bagi barang dagangan imperialis, jang kesemuanja ini

menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan membikin ekonomi Indonesia mendjadi sangat tergantung pada sistim dunia kapitalis. Pada tahun 1952 penanaman modal AS ditaksir berdjumlah \$ 350 djuta. Kemudian ditambah dengan penanaman modal AS di-perusahaan² minjak bumi (meliputi Shell, Stanvac, Caltex) tak kurang dari \$ 171 djuta, dan apa jang disebut „bantuan ekonomi“ AS sedjumlah \$ 639 djuta (keterangan duta-besar AS, H. Jones), merupakan bentuk neo-kolonialisme AS dibidang ekonomi. Selandjutnja sekarang sudah diketahui umum bahwa peraturan² „26 Mei 1963“, jang bertentangan dan bahkan terang²an mensabot Dekon, sebagai akibat politik reaksioner dari unsur² anti-Rakjat dalam Kabinet Kerdja susunan lama, akibat politik tunduk pada „program stabilisasi ekonomi“ a'la Amerika Serikat, menurut keterangan WPM I Dr. Subandrio dimuka DPRGR pada tgl. 11 Desember 1963, telah „dikeluarkan dengan harapan akan bantuan dari luarnegeri beberapa ratus djuta dollar“. Disamping itu kekurangadjaran kaum imperialis AS untuk terus menggerowoti ekonomi Indonesia dan mengantjam kedaulatan RI, a.l. dengan memasukkan Armada ke-VII AS kedaerah perairan Samudera Indonesia, dan tjampurtangan imperialis AS dalam perdjuaan Indonesia mengganjang „Malaysia“, membenarkan pendirian kita, bahwa imperialis AS telah menggantikan imperialis Belanda sebagai

musuh nomor satu dan paling berbahaja dari Rakjat Indonesia.

Disamping imperialisme jang mengangkingi kehidupan ekonomi Indonesia berlangsung pula kegiatan kaum kapitalis birokrat dan burdjuasi komprador jang langsung merusak ekonomi sektor negara dan sektor swasta nasional patriotik. Merekalah OKB² (Orang² Kaja Baru), dan OKM² (Orang² Kaja Mendadak) jang tampil sebagai penghisap² besar di-kota² dengan agen² dan kaki-tangan-kakitangannya di-desa².

Sedangkan kenjataan di-desa² menundjukkan bahwa hubungan agraris disamping pengaruh imperialis jang menguasai perkebunan (karet, tembakau, kopi, kopra, dsb.) masih terdapat hubungan-hubungan ekonomi jang bersifat feodal, dan kaum tani, terutama kaum buruhtani dan tanimiskin, hidupnya dalam keadaan melarat dan tergantung pada tuantanah feodal. Kenjataan ini disebabkan berhubung dengan masih adanya hak monopoli tuantanah atas milik tanah jang dikerdjakan kaum tani jang tak bertanah, pembajaran sewatanah dalam udjud barang hasil panen kepada tuantanah, adanya sistim sewatanah dalam bentuk kerdja ditanah tuantanah dan adanya tumpukan hutang jang menempatkan kaum tani dalam kedudukan budak terhadap pemilik² tanah dan terhadap lintah darat. Djadi, sisa² feodalisme tidak identik dengan sisa² kaum ningrat, seperti jang

sering disalahartikan. Penghisapan setjara feodal bisa dilakukan, dan dilakukan dengan ganas, oleh seseorang tuantanah yang setetespun tidak mempunyai „darah ningrat“.

Meskipun aksi massa revolusioner kaum tani dan perjuangannya kaum revolusioner dalam DPRGR telah menghasilkan UUPA dan UUPBH, namun pelaksanaan undang² tsb. mengalami banjak sahotase dan realisasinya sangat lambat atau matjet samasekali. Sebenarnja UUPA baru membatasi dan belum sampai menghapuskan sistim tuantanah dan penghisapan feodal di-desa².

Kenjataan-kenjataan di-bidang² ekonomi tsb. djuga tertjermin di-bidang politik dan kebudayaan. Tidak bisa dibantah bahwa kaum imperialis dengan keras berusaha untuk tjampurtangan dalam urusan politik, seperti dalam politik konfrontasi dengan „Malaysia“, dalam pembebasan Irian Barat, dalam penyelenggaraan Asian Games dan Ganefo, dalam politik pembangunan dsb., dsb. Disamping itu djelas, bahwa pengaruh kaum imperialis dan kaum feodal di-bidang kebudayaan masih tjukup besar di Indonesia, seperti terbukti dari persentase yang tinggi (sampai 90%) dari pemutaran film² AS di Indonesia, beredarnya penerbitan-penerbitan dan lagu² yang membawa pandangan, pendirian dan selera imperialis, dsb., dsb.

Berdasarkan kenjataan² tsb. dapat diambil kesimpulan bahwa sifat masyarakat Indonesia masih

belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal. Kata² „belum merdeka penuh“ menundjukkan bahwa disatu pihak Indonesia bukan negeri yang tidak merdeka, tetapi di-fihak lain menundjukkan bahwa Rakjat Indonesia masih harus berdjuaang untuk merebut kemerdekaan yang penuh baik dilapangan ekonomi, politik maupun kebudayaan, untuk penyelesaian revolusi nasional dan demokratis.

Dengan demikian mendjadi djelaslah tentang soal² pokok revolusi Indonesia sbb. : tentang *sasaran revolusi*, jaitu imperialisme dan feodalisme beserta pembantu²nja kaum kapitalis komprador dan kaum kapitalis birokrat, sedang musuh nomor satu revolusi ialah imperialisme AS yang djuga merupakan musuh Rakjat² sedunia; tentang *tugas revolusi*, jaitu melawan dengan gigih dan menumbangkan kekuasaan imperialisme dan feodalisme untuk mendirikan kekuasaan Rakjat; tentang *kekuatan revolusi*, jaitu semua golongan Rakjat yang dirugikan imperialisme dan feodalisme, jaitu klas buruh, kaum tani, burdjuaasi ketjil dan burdjuaasi nasional; tentang *kekuatan pendorong revolusi*, jaitu klas buruh, kaum tani dan burdjuaasi ketjil yang konsekwen melawan imperialisme dan feodalisme; tentang *sifat revolusi*, jaitu revolusi nasional dan demokratis, sebagai tahap pertama revolusi Indonesia; dan tentang *perspektif revolusi* Indonesia, jaitu Sosialisme, sebagai realisasi tahap kedua revolusi Indonesia.

Mengenal soal' pokok revolusi Indonesia dengan sederhana dapat dirumuskan: 1, 1, 2, 3, 4, atau do, do, re, mi, fa, jaitu: 1 jang pertama = satu kekuatan pelopor, jaitu klas buruh; 1 jang kedua = satu kekuatan pokok revolusi, jaitu kaum tani; 2 = dua kekuatan jang mendjadi basis front persatuan nasional, jaitu klas buruh dan kaum tani; 3 = tiga kekuatan pendorong revolusi, jaitu klas buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil; 4 = empat kekuatan revolusioner front nasional, jaitu klas buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional.

2) TENTANG MANIPOL DAN PROGRAM PKI

Manifesto Politik RI atau Manipol, jaitu Pidato Presiden Sukarno pada tgl. 17 Agustus 1959, dengan perintjiannja oleh DPA beserta pedoman' pelaksanaannja, seperti pidato' Djarek, Resopim, Takem, Dekon, dll., telah disahkan sebagai Garis Besar Haluan Negara RI oleh Sidang pertama MPRS.

Manipol haruslah diartikan keseluruhannja, jang djika diringkas tertjakup dalam „9 Wedjangan" Bung Karno mengenai: 1) Revolusi; 2) Pantja Sila dan Progresi-isme; 3) Kepribadian Indonesia — jang berpusat kepada gotongrojong, musjawarah dan mufakat; 4) Persatuan nasional revolusioner; 5) Memberantas Komunisto-phobi; 6) Mutlak-perlunja poros Nasakom; 7) Djahatnja liberalisme; 8) Perlunja satu pimpinan nasional; dan

9) Sosialisme. Sembilan wedjangan ini adalah perasan daripada semua bahan pokok indoktrinasi dan harus mendjadi milik bersama Rakjat Indonesia, termasuk milik Angkatan Bersendjata.

Disamping program pemerintah dan program angkatan bersendjata, Manipol djuga program partai', ormas' dan perseorangan, pendeknja program dari front nasional. Tiap partai dan ormas mempunjai programnja sendiri, tapi semua harus melaksanakan program bersama, Manipol.

Selanjutnja Manipol djuga menegaskan sifat dan program revolusi Indonesia, jang terdiri dari 2 tahap jaitu „pertama, tahap mentjapai Indonesia jang merdeka penuh, bersih dari imperialisme dan sisa' feodalisme. Tahap ini masih harus diselesaikan dan disempurnakan, kedua, tahap mentjapai Indonesia ber-sosialisme Indonesia, bersih dari kapitalisme dan dari exploitation de l'homme par l'homme. Tahap ini hanja bisa dilaksanakan dengan sempurna setelah tahap pertama sudah diselesaikan seluruhnja". („Djarek", dalam *Tubapi* halaman 171-172).

Dari uraian tsb. djelaslah bahwa Manipol jang lahir pada tahun 1959, 5 tahun jl., lahir dari kantjah perjuangan Rakjat Indonesia melawan imperialisme dan feodalisme. Program PKI jang telah disahkan oleh Kongres Nasional ke-V tahun 1954, sepuluh tahun jang lalu, dan disempurnakan dalam Kongres Nasional ke-VI dan ke-VII adalah program jang konsekwen anti-imperialis

dan anti-feodal. Karena itu ada hubungan yang sangat erat antara Manipol dengan program PKI. Pangkal persamaan ialah mengenai strategi umum revolusi Indonesia. Baik program PKI maupun Manipol mengakui adanya 2 tingkat atau 2 tahap revolusi Indonesia, tahap revolusi nasional-demokratis dan tahap revolusi sosialis.

Makaitu kaum Komunis Indonesia mengatakan bahwa melaksanakan Manipol setjara konsekwen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI, kaum Komunis Indonesia harus senantiasa konsekwen dan menjadi teladan dalam melaksanakan Manipol. Hanya kaum Manipolis-munafik dan kaum reaksioner yang berusaha menghambat dan mensabot Manipol. Tidak bisa dibantah, bahwa semakin baik pelaksanaan program PKI, semakin lantjar pelaksanaan Manipol, dan semakin konsekwen Manipol dilaksanakan, semakin lantjar pelaksanaan program PKI.

Tetapi antara program PKI dengan Manipol juga ada perbedaannya. Manipol adalah program bersama dari Rakjat untuk penyelesaian revolusi Indonesia, program Front Nasional, sedangkan program PKI adalah program kelas buruh untuk penyelesaian revolusi Indonesia pada tingkat sekarang. Perbedaan terpenting ialah dalam hal *pimpinan revolusi*. Program PKI menunjukkan dengan tegas bahwa pimpinan revolusi harus berada ditangan kelas buruh bila ingin mentjapai tujuan-

nja. Tentu tidak dapat diharapkan adanya perumusan demikian dalam Manipol. Tentang ini kaum Komunis dapat memahami sepenuhnya.

Tetapi, walaupun demikian, dalam Manipol dinyatakan perlunya ada satu *pimpinan nasional* yang berdjawa Manipol, dan bahwa kaum buruh dan kaum tani adalah sokoguru revolusi. Ada orang yang menuduh, se-olah² PKI tidak mengakui adanya satu pimpinan nasional dengan mengadakan „pimpinan kelas buruh“. PKI sebagai partai kelas buruh tentu mengadakan „pimpinan kelas buruh“, jaitu pimpinan ideologi kelas buruh, ideologi revolusioner anti penghisapan atas manusia oleh manusia. Sedangkan yang diartikan pimpinan nasional ialah pimpinan yang berdjawa Manipol. Karena pelaksanaan Manipol setjara konsekwen adalah sama halnya dengan pelaksanaan program PKI, maka pengadjuan masalah pimpinan kelas buruh tidaklah bertentangan dengan penerimaan PKI terhadap perlunya ada satu pimpinan nasional dan pimpinan Bung Karno yang Manipolis.

Demikianlah keterangannya, mengapa kaum Komunis Indonesia dalam melaksanakan program Manipol harus berdiri dibarisan depan dan sungguh-sungguh bertekad untuk menjadi teladan.

3) TENTANG PKI DAN PROGRAM KABINET KERDJA

Mendjelaskan tema ini sekaligus berarti setjara singkat mengutarakan taktik² PKI sekarang, baik

dalam menghadapi politik dalam negeri maupun politik luar negeri Pemerintah RI.

Dalam Sidang Pleno II CC PKI akhir tahun yang lalu sikap PKI sudah dikemukakan se terang-terangnya menjokong triprogram kabinet kerdja gaja baru: a) *Sandangpangan*; b) *pengganjangan „Malaysia“*, dan c) *meneruskan pembangunan*.

a). PKI sudah lama berpendirian bahwa untuk memetjahkan masalah sandangpangan, kita harus djuga berdiri diatas kaki sendiri, dengan pertama melaksanakan landreform yang radikal, jaitu mendjalankan program agraria PKI, jaitu pensitaan tanah tuantanah, pembagian tanah sitaan dengan tjuma kepada kaum tani penggarap dan anggota keluarganja seorang sebagai milik perseorangan. Dengan demikian tenaga produktif didesa bisa dibebaskan, dan produksi bisa ditingkatkan. Tapi program agraria PKI sekarang belum bisa diterima oleh burdjuasi nasional. Karena itu dilahirkanlah UUPBH (Undang² Perdjangjian Bagi Hasil) dan UUPA (Undang² Pokok Agraria), jaitu undang² yang membatasi milik tanah tuantanah. Tapi pelaksanaan kedua Undang² ini sangat lambat dan matjet. Fihak resmi menjatakan bahwa berdasarkan UUPA sebanjak 1 djuta ha harus dibagikan. Tapi yang terdaftar baru kira² seperlima, dan dari yang seperlima baru 9% yang dibagikan, dan dari yang 9% ini lebih dari separoh djatuh ketangan yang tak berhak. Demikian pula keadaannya dengan

pelaksanaan UUPBH. Makaitu adalah adil apabila kaum tani melaksanakan gerakan aksi-sefihak, jaitu melaksanakan UUPBH dan UUPA tanpa menunggu-nunggu kesediaan tuantanah yang terus-menerus mensabot pelaksanaan kedua undang² tsb. PKI berpendirian bahwa pelaksanaan UUPBH dan UUPA setjara konsekwen adalah tindakan revolusioner yang menguntungkan pemerintah, tidak hanya dapat mempertjepat pelaksanaan undang-undang yang semestinja di Djawa sudah selesai dalam tahun 1963, tapi djuga memberi dasar kepada pemerintah untuk dapat mensukseskan program sandangpangan Kabinet Kerdja.

Dalam pada itu PKI menjokong tuntutan kaum tani sbb. : 1) *Panitia Landreform* supaya berporoskan Nasakom, 2) *Rituling Personalia Djawatan Agraria*; 3) *Pengadilan Landreform* supaya dibentuk dengan ikutsertanja kaum tani.

b). Dalam melaksanakan program *pengganjangan „Malaysia“* PKI berpegang teguh pada pendirian bahwa mengganjang „Malaysia“ adalah „a matter of principle“ dan bahwa konfrontasi total dengan „Malaysia“ meneguhkan kedaulatan R.I. menghantjurkan intervensi neo-kolonialisme Inggris yang disokong oleh imperialisme AS.

PKI menentang pendirian reformis dalam menghadapi „Malaysia“, yang buru² bersikap sedia mengakui apa yang dinamakan „Malaysia“. Mereka berdalih se-olah² kalau terus berkonfrontasi

dengan „Malaysia“ Indonesia akan ambruk karena kesulitan² ekonomi dalam negeri.

PKI juga menentang pendirian avonturis dalam menghadapi „Malaysia“, yaitu pendirian kaum Bonapartis yang mau buru² menjerbu daerah Kalimantan Utara untuk mengobarkan peperangan didaerah ini dan siap² keluar sebagai pemenang dan pembebas Kalimantan Utara. Perjuangan kemerdekaan Rakjat Kalimantan Utara tidak tergantung terutama pada bantuan Indonesia, tapi terutama tergantung pada Rakjat Kalimantan Utara sendiri.

PKI berpendirian bahwa perjuangan menggagang „Malaysia“ harus dilaksanakan terus *setjara re: olusioner* dan dengan penuh kejakinan bahwa Indonesia tidak akan ambruk karena kesulitan ekonomi, tapi Indonesia akan keluar dari konfrontasi dengan kemenangan, djika kita :

1. terus mengkonsolidasi front anti-„Malaysia“ didalam negeri dengan djalan *setjara* konsekwen melakukan perjuangan anti-imperialis dan anti-feodal, melaksanakan landreform, meneruskan pengambilalihan perusahaan² Inggris, memperkuat ekonomi negeri, melawan neo-kolonialisme disemua bidang ekonomi dan melaksanakan kegotongrojongan nasional berporoskan Nasakom disegala bidang.

2. terus memperkuat front anti-„Malaysia“ didaerah Malaja, Singapura dan Kalimantan Uta-

ra, mengakui Pemerintah NKKU dibawah pimpinan Perdana Menteri Azahari dan membantu perjuangan sukarelawan² melawan kekuasaan neo-kolonialisme „Malaysia“.

3. terus menggagang front internasional anti-„Malaysia“ dengan menarik kekuatan² NEFO lainnja menggagang „Malaysia“, dengan terus meningkatkan solidaritet internasional membantu Rakjat Kalimantan Utara dan memboikot „Malaysia“. Hal ini bisa dikembangkan antara lain dengan melaksanakan Konferensi Bandung ke-II.

Dari uraian diatas djelaslah bahwa perjuangan menggagang „Malaysia“ tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan program sandangpangan dan program pembangunan.

PKI menjambut hangat seruan Presiden Sukarno kemarin (16-III-64) untuk mengadakan gerakan sukarelawan guna menggagang lebih hebat „Malaysia“. Dalam tjeramah saja dihadapan Universitas Indonesia semalam, saja djuga telah menjerukan agar pemuda² dan mahasiswa² berdujundjun mendaftarkan diri sebagai sukarelawan.

- c). Dalam menghadapi program meneruskan pembangunan, PKI berpendapat bahwa kuntjinja terletak djuga pada pelaksanaan landreform, pada pembebasan tenaga produktif di-desa², sehingga dapat mensukseskan tidak hanja dalam pelaksanaan program sandangpangan, tapi djuga dalam

pembangunan. Dalam hubungan dengan ini juga penting masalah penetapan titiliberat pembangunan, yaitu mengutamakan pembangunan dibidang jang vital, jang langsung dapat memberi sumbangan pada pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, pendeknja pada pelaksanaan *Dekon* setjara konsekwen. Menaikkan produksi adalah keharusan, dan ini hanja mungkin djika „setjara prinsip mengembangkan tenaga produktif daripada buruh dan tani” (*Gesuri*).

Sjarat utama untuk melaksanakan pembangunan ialah mengachiri penjelewengan „26 Mei 1963”, menggantinya dengan peraturan¹ ekonomi jang sesuai dengan *Dekon*, sesuai dengan tugas revolusi nasional dan demokratis sekarang ini. Hanjalah dengan teguh² berdiri diatas kaki sendiri, maka barulah Indonesia dapat setapak demi setapak menggerowoti ekonomi kolonial jang masih bertjokol di Indonesia, dan melepaskan diri dari berbagai bentuk neo-kolonialisme dibidang ekonomi. Tindakan ini dapat dilaksanakan dengan sukses apabila dengan segera dilakukan keputusan³ PB Front Nasional 5 September 1963 mengenai perubahan peraturan² ekonomi 26 Mei 1963, rituling aparatur negara, terutama sekali membentuk Kabinet Gotongrojong berporoskan Nasakom.

Kabinet Gotongrojong berporoskan Nasakom bukan suatu wasiat, akan tetapi pasti lebih baik daripada jang tidak gotongrojong dan tidak Na-

sakom, se-kurangnja ia membuka kemungkinan⁴ jang lebih baik bagi penjelesaian masalah⁵ dalam negeri maupun internasional.

4) TENTANG PKI DAN ANGKATAN BERSENDJATA R.I. CHUSUSNJA AURI

Seperti sudah saia sebut pada permulaan tjeramah ini, antara PKI dan Angkatan Bersendjata sudah terdapat tradisi persatuan jang lama, dan jang senantiasa terus dipelihara, dipupuk dan dikembangkan.

Memang masih ada djuga sementara orang jang merupakan kekuatan gelap, jang masih hidup dalam alam fikiran bahwa PKI dengan alat⁶ negara chususnja Angkatan Bersendjata, harus bentrokan. Djika menggunakan kata⁷ Presiden Sukarno, mereka sebenarnja „orang” jang otak dan hatinja telah berdaki-berkarat tak dapat menjesuaikan diri dengan Manipol-Usdek”. (*Tubapi*, hal. 211). Tidak bisa disangkal, bahwa adanja orang⁸ revolusioner dalam Angkatan Bersendjata, baik AURI maupun Angkatan⁹ lain adalah sangat membantu PKI dalam mengubah pandangan Rakjat terhadap Angkatan Bersendjata, dan djuga untuk mengubah pandangan Angkatan Bersendjata terhadap gerakan revolusioner, termasuk PKI.

Untuk memahami watak Angkatan Bersendjata RI adalah sangat penting menjedari, bahwa *kekuasaan politik Indonesia atau kekuasaan RI mempunyai 2 aspek, jaitu aspek pro-Rakjat jang*

mewakili kepentingan² Rakjat dan aspek anti-Rakjat yang mewakili kepentingan² musuh² Rakjat.

Kenjataan² menundjukkan bahwa dalam kekuasaan negara RI tidak hanya ada kaum komprador, kaum kapitalis birokrat, kaum tuan tanah, tapi juga ada orang² yang pro-Rakjat, yang disokong kaum buruh, kaum tani, inteligensia revolusioner dan elemen² demokratis lainnya.

Aspek pro-Rakjat telah menempati kedudukan memimpin dalam kontradiksi itu pada waktu sekarang. Hal ini dibuktikan oleh semakin banyaknya politik revolusioner yang disahkan oleh kekuasaan negara R.I. seperti Manipol, Dekon, Ganjang Malaysia, Nefo kontra Oldefo, UUPA, UUPBH, dsb. Aspek anti-Rakjat sudah merupakan aspek yang tidakpokok, tapi aspek ini masih menempati kedudukan ber-dominasi dan masih bisa menjelakan Rakjat. Hal ini dibuktikan oleh kenyataan masih adanya politik yang reaksioner yang didjalkan atasnama negara, seperti misalnya „Sob tanpa Sob“, Peraturan² „26 Mei 1963“ atau penggantianja yang sama djeleknja, instruksi peraturan ambilalih perusahaan² Inggris, matiam² perundang²an yang melindungi kepentingan² imperialis dan tuan tanah, dsb. Makaitu pula sering kita semua mendengar seruan Bung Karno sebagai Presiden/Panglima Tertinggi supaya Rakjat membantu beliau mengganjang dan meritul mereka yang anti-Nasakom, jaitu elemen² anti-Rakjat yang

masih berperanan dalam kekuasaan politik sehingga merupakan perintang besar bagi pembentukan Kabinet Gotongrojong berporoskan Nasakom.

Tanpa memahami adanya dua aspek dari kekuasaan politik dinegeri kita sulitlah untuk benar² memahami berbagai peristiwa di Indonesia dewasa ini, sehingga mudah terdjerumus pada hanya menilai kulit belaka dan tidak menilai isi (hakeka:) peristiwa² yang terdjadi.

Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, termasuk AURI, sebagai alat negara yang dilahirkan oleh revolusi Agustus 1945 mempunyai tjiri² seperti yang pernah saja sebutkan dalam tjeramah SESKOAD, sbb. : 1) anti-fasis, demokratis, anti-imperialis dan ber-tjita² Sosialisme Indonesia, alat untuk mengabdikan pada penyelesaian Revolusi Indonesia; 2) alat untuk mengabdikan pada perdjjuangan besar NEFO kontra OLDEFO ; 3) alat pembela keutuhan wilayah dan kesatuan nasion Indonesia.

Mengingat akan kechususan kedudukan geografis Indonesia, AURI merupakan potensi yang sangat penting untuk bersama Rakjat setjara sedar mendorong dan memperkuat aspek pro-Rakjat daripada kekuasaan politik sekarang dan mengganjang aspek anti-Rakjat, mengganjang mereka yang Nasakom-phobi, yang Komunisto-phobi, dan yang membela kepentingan imperialis dan tuan tanah. Dalam perdjjuangan ini AURI telah memainkan peranan penting dan saja yakin, bahwa harapan Rakjat tidak akan sia², jaitu agar AURI

tetap setia pada Rakjat dan Revolusi Indonesia.

5) TENTANG PKI DAN TUGAS² INTERNASIONAL REVOLUSI INDONESIA

Revolusi Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari revolusi dunia, yaitu revolusi sosialis dunia. Tiga kerangka Manipol yang menjadi program pemerintah dan Rakjat Indonesia menunjukkan hubungan antara revolusi Indonesia dengan gerakan revolusioner Rakjat² semua negeri untuk membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme.

Tugas internasional Revolusi Indonesia sekarang pada hakekatnya ialah memperkuat front internasional anti-imperialis, yaitu KBST (kekuatan baru yang sedang tumbuh) untuk melawan KLMB (kekuatan lama yang masih bertajuk). Gerakan revolusioner Rakjat Indonesia dapat menunaikan tugas ini, apabila ia mengintegrasikan diri dengan revolusi-revolusi Rakjat² semua negeri, yang anti-imperialis, anti-kolonial dan anti-neo-kolonial. Tidak bisa disangkal bahwa pengintegrasian revolusi Indonesia dengan revolusi dunia sangat tergantung pada sikap PKI terhadap gerakan revolusioner sedunia dan khususnya terhadap GKI (Gerakan Komunis Internasional).

Didunia dewasa ini terdapat *kontradiksi² dasar* sbb.: 1) antara kubu sosialis dengan kubu imperialis, 2) antara kelas proletar dengan kelas burjuis di-negeri² kapitalis, 3) antara nasion² tertin-

das dengan imperialisme, 4) antara imperialisme dengan imperialisme. Kontradiksi dasar itu menjirai dunia dewasa ini. Diantara kontradiksi² tsb., dua merupakan *kontradiksi pokok*, yaitu kontradiksi-kontradiksi yang dewasa ini mempunyai peranan memimpin kontradiksi lainnya, adalah 1) dan 3). Tetapi pada dewasa ini, diantara kontradiksi² itu yang merupakan *kontradiksi terpokok*, kontradiksi yang tidak hanya memimpin kontradiksi² lainnya tapi juga menuntut penyelesaiannya yang segera, yaitu: *Kontradiksi antara nasion² tertindas dengan imperialisme*. Negeri² Asia, Afrika dan Amerika Latin membuktikan dengan tegas bahwa kontradiksi antara nasion² tertindas dengan imperialisme, yang dikepalai oleh imperialis AS, terus menghebat. Di-benua² itulah kaum imperialis mendapat pukulan² yang semakin keras dan disitulah pula terdapat *situasi revolusioner* yang terus menanjak dan matang.

Asia Tenggara merupakan salahsatu titikpusat didaerah kontradiksi terpokok. Situasi revolusioner di Asia Tenggara juga terus menanjak dan matang dan perjuangan melawan imperialisme, dengan menggunakan berbagai macam bentuk, termasuk perjuangan bersenjata, tidak pernah berhenti di Asia Tenggara. Misalnja sekarang perjuangan Rakjat Indonesia mengganjang „Malaysia“, telah memberi sumbangan pula dalam perjuangan anti-imperialisme di Asia Tenggara,

sebagaimana halnya perjuangan Rakjat Vietnam Selatan melawan imperialisme AS.

Dalam perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme itu tidak bisa kita bersikap atuh-tak-atuh terhadap revisionisme modern, yang merupakan ratjun untuk melumpuhkan perjuangan revolusioner anti-imperialis. Pengalaman* kaum revisionis modern Jugoslavia misalnja, tjukup dikenal umum di Indonesia. Dalam kasak-kusuknja mereka menjebar-njebarkan pandangan garis djalan-tengah atau garis non-blok yang membikin kabur perjuangan anti-imperialis, yang bertentangan dengan garis NEFO kontra OLDEFO. Kaum revisionis dan kakitangan imperialis lainnja menjebar-njebarkan pandangan humanisme universil dikalangan tokoh* Indonesia, terutama dikalangan inteligensia dan seniman, untuk mengendorkan semangat perjuangan revolusioner. Kaum revisionis Jugoslavia malahan sampai tjampurtangan dalam urusan dalam negeri Republik Indonesia, menentang gagasan NASAKOM dengan menuntut supaya Pemerintah RI mengambil tindakan terhadap PKI yang dengan gigih mela-ndjangi revisionisme modern.

Revisionisme modern pada hakekatnja adalah perwujudan ideologi burdjuis yang tumbuh dalam gerakan klas buruh internasional dewasa ini, yang mengchianati perjuangan revolusioner klas buruh dan meninggalkan adjaran revolusioner Marxisme-

Leninisme. Pada hakekatnja revisionisme modern ingin merevisi tekad revolusioner Rakjat, ingin merevisi djalan revolusioner dan menggantikannja dengan djalan evolusioner, reformisme dan bahkan kontra-revolusioner.

Makaitu perjuangan melawan revisionisme modern bukanlah soal kaum Komunis Indonesia semata*, tetapi soal semua orang revolusioner. Dan perjuangan melawan revisionisme djuga bukan hanja soal kaum Komunis sedunia sadja, tetapi djuga soal seluruh kekuatan baru yang sedang tumbuh, yang melawan imperialisme.

Menurut pengalaman Rakjat Indonesia, seperti halnya dalam GANEFO jl, djika kaum revisionis itu dilawan dengan keras mereka pasti mundur dan perjuangan anti-imperialis bisa kokoh. Tapi djika tidak dilawan, perjuangan anti-imperialisme mendjadi tidak berdaja dan kaum imperialis mendjadi makin ganas. Hal ini djuga dibuktikan oleh per-djuangan Rakjat negeri lain yang anti-imperialis dalam menghadapi kasak-kusuk kaum revisionis modern.

Mengenai perbedaan* pendapat dalam Gerakan Komunis Internasional (GKI), seperti yang sudah diketahui umum, PKI berpendirian untuk tetap mempertahankan azas kebebasan dan haksama. Sikap ini bukan sikap netral, tapi sikap yang mendjung tinggi Marxisme-Leninisme dan melawan revisionisme, baik yang klasik maupun yang

modern. PKI djuga menentang dogmatisme baik jang klasik maupun jang modern. Sikap jang mempertahankan azas *kebebasan dan haksama* sering dituduh oleh kaum revisionis sebagai soviniis, jang terang tidak beralasan. Sebaliknja kaum reaksioner dalam negeri djustru mendesak-desak supaya kami melepaskan azas kebebasan dan haksama, maksudnja supaya kami mengekor kaum revisionis dan berdjalan seiring dengan kaum imperialis.

Kaum Komunis Indonesia suka difitnah sebagai „agen Moskow“, „agen Peking“, dan djuga „agen Moskow dan Peking“, dsb. Semuanja ini adalah lagu lama dan sudah mulai dibungkam oleh fakta² dan bukti² njata dalam usaha² PKI jang berhasil meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme, mengabdikan diri lebih banjak kepada revolusi Indonesia dan kepada internasionalisme proletar. Keadaan ini pula jang membikin PKI tetap segar dalam perdjjuangan untuk seleksi, kristalisasi dan konsolidasi dalam Gerakan Komunis Internasional.

Dari seluruh uraian diatas djelaslah, bahwa perdjjuangan melawan imperialisme dan feodalisme serta revisionisme modern bukanlah se-mata² tugas kaum Komunis Indonesia, tapi tugas setiap patriot Indonesia. Perdjjuangan ini merupakan bagian² terpenting daripada perdjjuangan Rakjat Indonesia untuk membikin Indonesia benar² *berdaulat dalam politik, berdiri diatas kaki sendiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.*